

dukungan doa dan semangat, sehingga menjadi energi untuk menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi.

8. Teman-teman kuliah pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi Angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan doa dan semangat.
9. Sahabat-sahabat penulis dan semua pihak yang telah membantu memberikan dukungan doa dan semangat yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan, wawasan, kematangan pemikiran dan pengalaman penulis serta bahan-bahan bacaan/literatur yang penulis dapatkan. Oleh karena itu semua, kritik dan saran untuk perbaikan kemajuan kedepan sangat diharapkan dan diterima oleh penulis.

Akhirnya semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membaca terutama mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi.

Jambi, 27 Desember 2023

Julian Afendra Dinata

NIM. P2B119084

ABSTRAK

Reformasi birokrasi merupakan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem anggaran elektronik (*e-Budgeting*) merupakan sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah. *e-Budgeting* menjadi salah satu inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang mendukung pencapaian reformasi birokrasi di sektor Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan *e-budgeting* dalam pengelolaan keuangan daerah dan peran *e-budgeting* dalam proses reformasi birokrasi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Berdasarkan hasil analisa disimpulkan bahwa pengaturan e-Budgeting di setiap daerah ditetapkan sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah karena penerapan e-budgeting sangat tergantung pada kondisi daerah tersebut baik secara struktural (kelembagaan), prosedural, kultural, dan etika birokrasi. Penerapan e-budgeting dalam konteks reformasi birokrasi sangat erat kaitannya dengan bidang perubahan, terutama pada bidang penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kata kunci: e-budgeting, keuangan daerah, reformasi birokrasi